

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

Andeska Putra Pratama<sup>1)</sup>; Suratman<sup>2)</sup> ; Jatmiko Yogopriyatno<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,  
University of Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [andeskagt@gmail.com](mailto:andeskagt@gmail.com); <sup>2)</sup> [suratman@unib.ac.id](mailto:suratman@unib.ac.id); <sup>3)</sup> [iyogop@unib.ac.id](mailto:iyogop@unib.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2026]

Revised [15 Juni 2026]

Accepted [16 Juli 2026]

### KEYWORDS

Evaluasi Implementasi;  
Peraturan Daerah; Anak  
Jalanan; Gelandangan;  
Pengemis; Kebijakan Publik

**This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](#)  
license**



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan AJGP berdasarkan empat aspek evaluasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan total sampling 100 responden, analisis mencakup mean, standar deviasi, koefisien variasi, modus, dan analisis kesenjangan. Hasil menunjukkan implementasi pada kategori perlu perbaikan dengan mean keseluruhan 2,10 (SD=0,76; CV=36,2%; gap=0,90). Aspek partisipasi dan kendala memperoleh mean terendah (2,05) dan aspek pelaksanaan program tertinggi (2,14). Seluruh item menunjukkan variabilitas sedang-tinggi (CV 33,9%–40,4%). Jumlah AJGP meningkat 41,9% selama 2017–2024.

### ABSTRACT

This study describes the implementation level of Lubuklinggau City Regional Regulation No. 15 of 2017 on Street Children, Vagrants, and Beggars (AJGP) across four evaluation aspects using a descriptive quantitative approach with 100 respondents. Comprehensive descriptive statistics include mean, SD, coefficient of variation, mode, and gap analysis. Results show the overall mean of 2.10 (SD=0.76; CV=36.2%; gap=0.90) in the needs-improvement category. The AJGP population increased 41.9% from 2017 to 2024.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (AJGP) merupakan kelompok sosial yang menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Mereka tergolong sebagai kelompok rentan yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak. Kondisi ini tidak hanya menjadi isu kesejahteraan sosial, tetapi juga mencerminkan tantangan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial yang berkeadilan. Berdasarkan Data Kementerian Sosial RI tahun 2023, jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai lebih dari 16.000 jiwa, dengan peningkatan sebesar 7% dalam lima tahun terakhir (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

(Buni et al., n.d.) menegaskan bahwa kelompok rentan ini muncul akibat tekanan struktural yang kompleks, termasuk kemiskinan intergenerasi, pengangguran struktural, dan lemahnya jaringan perlindungan sosial. (Midgley, 1995) menyatakan bahwa penanganan permasalahan sosial harus menekankan strategi pembangunan manusia melalui upaya pemberdayaan yang sistematis, berkelanjutan, dan holistik.

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anak Jalanan di Indonesia Tahun 2018-2023**

| Tahun | Jumlah Anak Jalanan | Tertangani | Belum Tertangani | Persentase Tertangani |
|-------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| 2018  | 15.237 jiwa         | 3.856 jiwa | 11.381 jiwa      | 25,3%                 |
| 2019  | 15.684 jiwa         | 4.123 jiwa | 11.561 jiwa      | 26,3%                 |
| 2020  | 14.850 jiwa         | 3.687 jiwa | 11.163 jiwa      | 24,8%                 |
| 2021  | 15.920 jiwa         | 4.285 jiwa | 11.635 jiwa      | 26,9%                 |
| 2022  | 16.180 jiwa         | 4.456 jiwa | 11.724 jiwa      | 27,5%                 |
| 2023  | 16.342 jiwa         | 4.598 jiwa | 11.744 jiwa      | 28,1%                 |

Sumber: (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023)

Data Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah anak jalanan sebesar 7,2% dari 15.237 jiwa (2018) menjadi 16.342 jiwa (2023). Meski persentase penanganan meningkat dari 25,3% menjadi 28,1%, jumlah absolut yang belum tertangani masih mencapai 11.744 jiwa pada 2023, mengindikasikan kelemahan dalam variabel sumber daya dan koordinasi (Van Meter & Van Horn, 1975).

**Tabel 2. Perkembangan Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Indonesia Tahun 2019-2023**

| Tahun | Gelandangan | Pengemis    | Total        | Perubahan (%) |
|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 2019  | 28.650 jiwa | 82.870 jiwa | 111.520 jiwa | -             |
| 2020  | 27.980 jiwa | 79.540 jiwa | 107.520 jiwa | -3,6%         |
| 2021  | 29.840 jiwa | 84.750 jiwa | 114.590 jiwa | +6,6%         |
| 2022  | 30.520 jiwa | 86.920 jiwa | 117.440 jiwa | +2,5%         |
| 2023  | 31.250 jiwa | 88.630 jiwa | 119.880 jiwa | +2,1%         |

Sumber: (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023)

**Tabel 3. Perkembangan Jumlah AJGP di Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2024**

| Tahun | Anak Jalanan | Gelandangan | Pengemis | Total | Tertangani | % Tertangani |
|-------|--------------|-------------|----------|-------|------------|--------------|
| 2017  | 28           | 45          | 87       | 160   | 42         | 26,3%        |
| 2019  | 32           | 52          | 96       | 180   | 48         | 26,7%        |
| 2021  | 35           | 58          | 102      | 195   | 52         | 26,7%        |
| 2023  | 38           | 64          | 110      | 212   | 58         | 27,4%        |
| 2024  | 41           | 68          | 118      | 227   | 63         | 27,8%        |

Sumber: Dinas Sosial Kota Lubuklinggau (2024)

Di Kota Lubuklinggau, jumlah AJGP meningkat dari 160 jiwa (2017) menjadi 227 jiwa (2024), atau peningkatan 41,9%. Anak jalanan meningkat 46,4%, gelandangan 51,1%, dan pengemis 35,6%. Meski persentase penanganan sedikit meningkat dari 26,3% menjadi 27,8%, jumlah absolut yang belum tertangani meningkat dari 118 jiwa menjadi 164 jiwa yang mengindikasikan kesenjangan besar antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Bapak Yaudi, sebagian besar AJGP bukan penduduk asli karena Lubuklinggau berfungsi sebagai kota transit, menambah kompleksitas program pembinaan yang dirancang untuk penduduk lokal. DPRD Kota Lubuklinggau melibatkan 100 responden masyarakat untuk mengevaluasi implementasi kebijakan melalui empat aspek utama.

#### **Rumusan Masalah**

Bagaimana tingkat implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan AJGP berdasarkan aspek komunikasi dan sosialisasi, pelaksanaan program, perbaikan program, dan partisipasi serta kendala?

#### **Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan tingkat implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 berdasarkan keempat aspek tersebut secara menyeluruh guna memberikan dasar evaluasi kebijakan yang berbasis bukti empiris.

## **LANDASAN TEORI**

### **Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menilai nilai, manfaat, dan kinerja suatu kebijakan (Dunn, 2021). (Edward III, 1980) mengemukakan empat variabel utama keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. (Van Meter & Van Horn, 1975) menambahkan variabel standar tujuan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial politik, dan respons kelompok sasaran.

### **Kerangka Teori Key Implementation Evaluation Questions (Wholey et al., 2015)**

(Wholey et al., 2015) mengembangkan kerangka evaluasi empat tahap: Stage 1 (Assess Need and Feasibility), Stage 2 (Plan and Design the Program), Stage 3 (Deliver the Program), dan Stage 4 (Improve the Program). Model ini tidak hanya menilai efektivitas teknis, tetapi juga memberi ruang untuk policy learning dan continuous improvement yang relevan dengan konteks penelitian ini.

### **Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017**

Perda ini menetapkan kerangka pembinaan AJGP yang mencakup pendataan, penjangkauan, pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial, dan kewenangan penertiban. Perda ini menjadi landasan hukum utama bagi Dinas Sosial dan Satpol PP di Kota Lubuklinggau.

### **Penelitian Terdahulu**

(Pertiwi et al., 2023) menemukan pelaksanaan Perda AJGP di Bandar Lampung belum maksimal akibat komunikasi eksternal yang belum optimal dan keterbatasan anggaran. (Nugroho et al., 2022) di Kota Bengkulu menemukan kendala fasilitas dan penerimaan masyarakat. (Hidayat, 2020) mengidentifikasi keterbatasan SDM, minimnya anggaran jangka panjang, dan lemahnya koordinasi sebagai hambatan utama di Palembang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pola, kecenderungan, dan karakteristik implementasi kebijakan secara terukur dan sistematis melalui data numerik (Neuman).

### **Lokasi, Populasi, dan Sampel**

Penelitian dilakukan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Populasi adalah seluruh peserta kegiatan pengawasan DPRD Kota Lubuklinggau terkait Perda No. 15 Tahun 2017 (n=100). Teknik total sampling digunakan sehingga seluruh populasi menjadi sampel (Arikunto, 2020., Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan.

### Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: (1) kuesioner tertutup skala Likert 3 poin (S=3, KS=2, TS=1); (2) dokumentasi sebagai data sekunder; dan (3) observasi non-partisipatif. Kuesioner terdiri dari 20 item pernyataan, masing-masing 5 item per aspek.

**Tabel 4. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen Penelitian**

| Aspek                      | Indikator                   | Item Kuesioner                                                  | Skala      |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Komunikasi dan Sosialisasi | Kejelasan sosialisasi       | Apakah Peraturan telah disosialisasikan dengan baik?            | Likert 1-3 |
|                            | Aksesibilitas informasi     | Apakah informasi mudah diakses?                                 |            |
|                            | Kesederhanaan bahasa        | Apakah isi peraturan mudah dipahami?                            |            |
|                            | Variasi media               | Apakah pemerintah menggunakan berbagai media?                   |            |
|                            | Kontinuitas sosialisasi     | Apakah sosialisasi rutin dan berkelanjutan?                     |            |
| Pelaksanaan Program        | Kesesuaian penerima manfaat | Apakah program sudah tepat sasaran?                             | Likert 1-3 |
|                            | Kesesuaian pelaksanaan      | Apakah program sudah berjalan sesuai rencana?                   |            |
|                            | SDM yang terlibat           | Bagaimana kualitas pelayanan dalam program?                     |            |
|                            | Kepuasan program            | Apa manfaat yang dihasilkan?                                    |            |
|                            | Dukungan sosial             | Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan program?                  |            |
| Perbaikan Program          | Ketercapaian program        | Apakah mencapai target yang ditetapkan?                         | Likert 1-3 |
|                            | Dampak program              | Apa manfaat yang diterima?                                      |            |
|                            | Dampak berkelanjutan        | Bagaimana dampak positif dari program pembinaan?                |            |
|                            | Monitoring                  | Bagaimana sikap pemerintah dalam pelaksanaan program?           |            |
|                            | Evaluasi                    | Apakah ada upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas program? |            |
| Partisipasi dan Kendala    | Kesediaan berpartisipasi    | Apakah masyarakat terlibat mengikuti program?                   | Likert 1-3 |
|                            | Jumlah partisipan           | Apakah masyarakat bersedia mengikuti program?                   |            |
|                            | Hambatan prosedural         | Apakah hambatan dalam program dapat diatasi?                    |            |
|                            | Aspirasi masyarakat         | Apa keluhan atau masukan dari masyarakat tentang program?       |            |
|                            | Koordinasi antar instansi   | Apakah koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik?    |            |

Sumber: Diolah dari Kerangka Teori (Wholey et al., 2015) dan (Edward III, 1980)

## Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan statistik deskriptif komprehensif meliputi: distribusi frekuensi dan persentase per kategori respons; mean dengan rumus  $\text{Mean} = \frac{\sum(f_i \times x_i)}{n}$ ; standar deviasi (SD); koefisien variasi ( $\text{CV} = \frac{\text{SD}}{\text{Mean}} \times 100\%$ ); modus; dan analisis kesenjangan ( $\text{gap} = 3,00 - \text{Mean}$ ). Kategorisasi: Mean 1,00–1,66 = Rendah; 1,67–2,33 = Sedang; 2,34–3,00 = Tinggi (Riduwan, 2021). Kategorisasi keseluruhan disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Kategorisasi Penilaian Implementasi Kebijakan**

| Total Skor | Kategori                | Status Implementasi         | Rekomendasi                                                                         |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 48-60      | Terlaksana dengan Baik  | Implementasi Berhasil       | Perda dapat dilanjutkan; pertahankan kualitas; evaluasi berkala                     |
| 34-47      | Perlu Perbaikan         | Implementasi Parsial        | Identifikasi aspek lemah; perbaikan bertahap; tingkatkan sosialisasi; monitor ketat |
| 20-33      | Gagal Diimplementasikan | Implementasi Tidak Berhasil | Evaluasi menyeluruh; pertimbangkan revisi; perbaiki mekanisme                       |

Sumber: Diadaptasi dari (Riduwan, 2021) dan (Wholey et al., 2015)

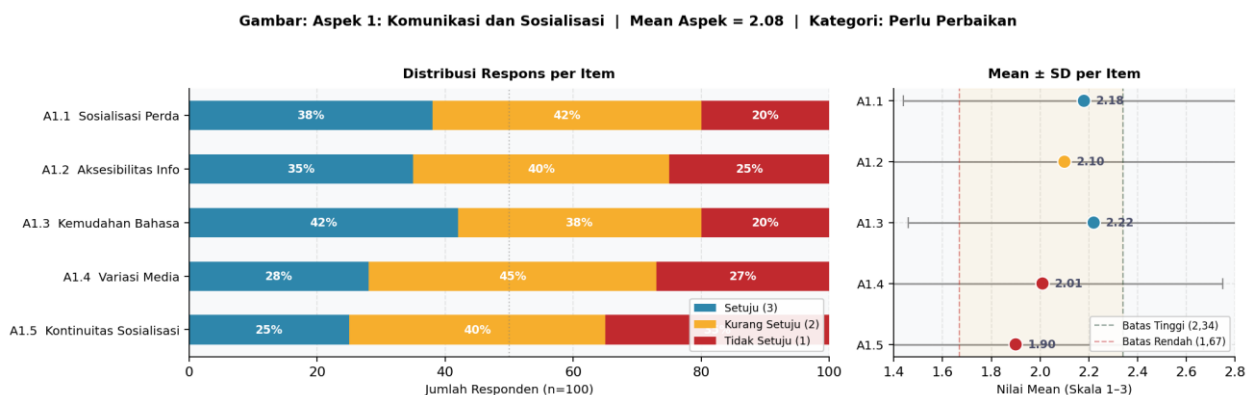
Uji validitas menggunakan Product Moment Pearson ( $r$  hitung >  $r$  tabel; sig. 5%). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha ( $\geq 0,60$ ) (Ghozali, 2021). Triangulasi dilakukan dengan data dokumentasi dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis statistik deskriptif komprehensif dari 100 responden terhadap empat aspek implementasi Perda No. 15 Tahun 2017. Setiap aspek divisualisasikan melalui: (1) diagram batang bertumpuk horizontal yang menampilkan distribusi respons setuju (S), kurang setuju (KS), dan tidak setuju (TS) per item; serta (2) dot plot mean  $\pm$  SD. Visualisasi ini memungkinkan pembaca memahami pola respons secara lebih intuitif dibanding data numerik semata. Ringkasan statistik disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

### Aspek 1: Komunikasi dan Sosialisasi

**Gambar 1. Distribusi Respons dan Nilai Mean  $\pm$  SD – Aspek Komunikasi dan Sosialisasi (n=100). Panel kiri: distribusi persentase respons; panel kanan: mean  $\pm$  SD dengan batas kategori.**



Gambar 1 memperlihatkan bahwa aspek komunikasi dan sosialisasi memperoleh nilai rata-rata 2,08 (SD=0,76; CV=36,4%; gap=0,92), berada pada kategori Sedang/Perlu Perbaikan. Dari visualisasi distribusi respons, terlihat bahwa kategori Kurang Setuju (KS) mendominasi hampir seluruh item, mengindikasikan ambivalensi persepsi masyarakat terhadap efektivitas komunikasi kebijakan.

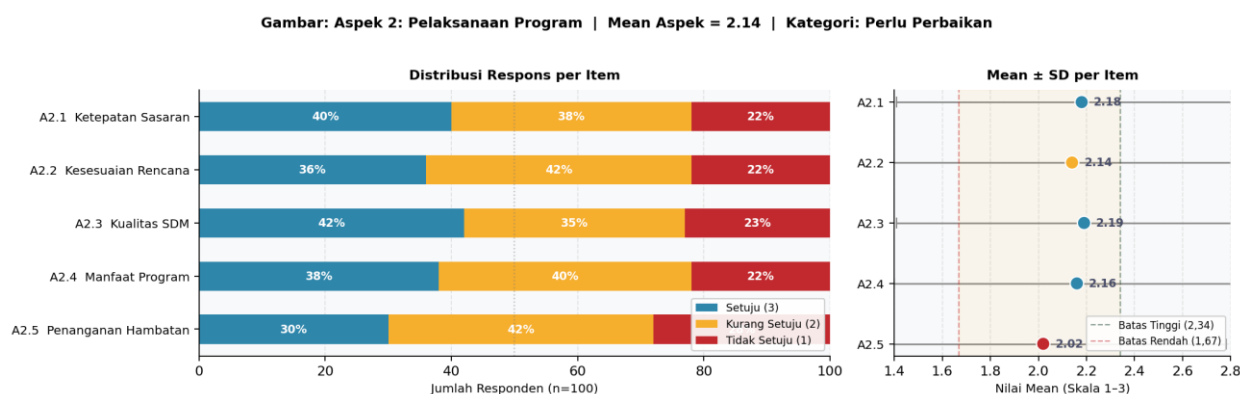
Item A1.5 (Kontinuitas Sosialisasi) menonjol sebagai titik kritis dengan mean terendah 1,90 (SD=0,77; CV=40,4%; gap=1,10). Distribusi batang menunjukkan 75% responden memberikan respons negatif (40% KS + 35% TS) proporsi ketidaksetujuan tertinggi di antara 20 item. Koefisien variasi 40,4% merupakan yang tertinggi dalam penelitian ini, mencerminkan heterogenitas persepsi terbesar. Sebaliknya, A1.3 (Kemudahan Bahasa) mencapai mean tertinggi 2,22 (SD=0,76; CV=34,1%) dengan 42% responden setuju, mengindikasikan konten peraturan yang relatif dipahami masyarakat.

Temuan wawancara memperkuat data kuantitatif ini. Bapak Sukri (36 tahun) menyatakan bahwa program sudah cukup jelas namun sosialisasinya masih jarang. Ibu Sulis (32 tahun) menekankan pentingnya komunikasi langsung dari petugas.

Mengacu pada teori (Edward III, 1980), komunikasi kebijakan harus memenuhi transmisi yang jelas, kejelasan informasi, dan konsistensi. Dua bukti empiris memperkuat argumen ini. Pertama, (Pertiwi et al., 2023) membuktikan bahwa frekuensi sosialisasi yang rendah berkorelasi langsung dengan rendahnya pemahaman masyarakat di Bandar Lampung (hanya 31% mengetahui isi kebijakan secara rinci). Kedua, (Nugroho et al., 2022) membuktikan bahwa multi-channel communication meningkatkan jangkauan sosialisasi sebesar 40% dibanding pendekatan satu saluran. Range aspek 0,32 (mean tertinggi-terendah) menandakan kesenjangan signifikan antar item yang perlu diselesaikan secara sistematis.

## Aspek 2: Pelaksanaan Program

**Gambar 2. Distribusi Respons dan Nilai Mean  $\pm$  SD – Aspek Pelaksanaan Program (n=100). Item A2.3 (Kualitas SDM) meraih mean tertinggi; A2.5 (Penanganan Hambatan) terendah.**



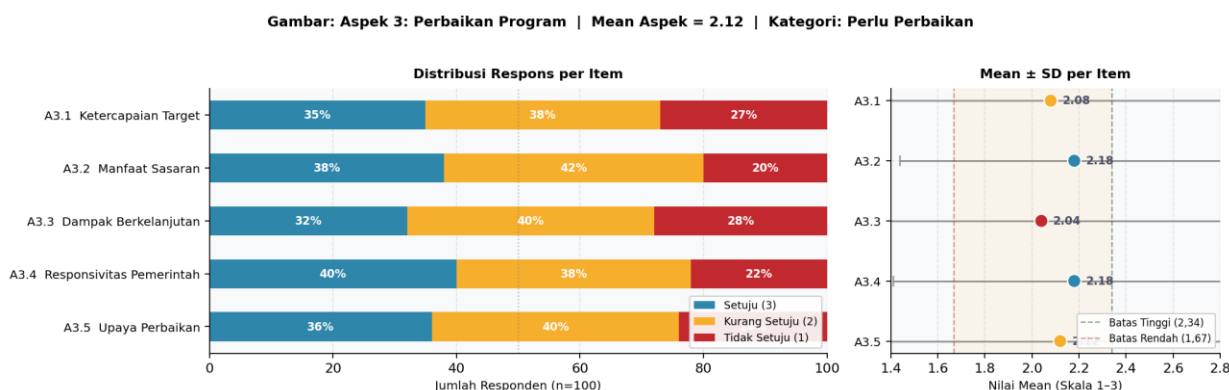
Gambar 2 menunjukkan aspek pelaksanaan program memperoleh mean tertinggi di antara keempat aspek, yaitu 2,14 (SD=0,76; CV=35,8%; gap=0,86). Visualisasi dot plot memperlihatkan bahwa seluruh item berada dalam rentang mean yang relatif sempit (range=0,17) terkecil dari keempat aspek yang mengindikasikan konsistensi persepsi responden terhadap pelaksanaan program.

Item A2.3 (Kualitas SDM) mencapai mean tertinggi 2,19 (SD=0,78; CV=35,8%), dengan 42% responden setuju. Distribusi batang A2.3 menunjukkan proporsi Setuju (42%) lebih besar dari TS (23%), mengindikasikan penilaian positif terhadap kompetensi aparat pelaksana. Sebaliknya, A2.5 (Penanganan Hambatan) memperoleh mean terendah 2,02 (SD=0,76; CV=37,7%; gap=0,98), di mana 70% responden (42% KS + 28% TS) meragukan kemampuan pelaksana mengatasi hambatan yang mengindikasikan bottleneck struktural.

Responden S (27 tahun) mengakui bahwa program sudah berjalan meski belum sempurna. Bapak Harsono (53 tahun) menilai koordinasi antarinstansi sudah lumayan namun sering terlambat. Dalam kerangka (Wholey et al., 2015), tahap program delivery merupakan fase krusial. Dua bukti empiris menguatkan temuan ini. Pertama, (Pressman & Wildavsky, 1984) mendokumentasikan bahwa kegagalan pada satu titik koordinasi dari 30 keputusan dalam implementasi program dapat menggagalkan keseluruhan program yang relevan dengan empat instansi pelaksana (Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan) di Lubuklinggau. Kedua, (Lipsky, 1980) membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya pada street-level bureaucrats mengakibatkan rasionalisasi layanan dan ketidaktepatan sasaran (mean A2.1=2,18).

### Aspek 3: Perbaikan Program

**Gambar 3. Distribusi Respons dan Nilai Mean  $\pm$  SD - Aspek Perbaikan Program (n=100). A3.3 (Dampak Berkelanjutan) merupakan titik kritis dengan gap=0,96.**



Gambar 3 memperlihatkan aspek perbaikan program dengan mean 2,12 ( $SD=0,77$ ;  $CV=36,2\%$ ; gap=0,88) pada kategori Sedang/Perlu Perbaikan. Visualisasi distribusi respons menunjukkan pola yang konsisten: modus kategori KS mendominasi semua item, mengindikasikan bahwa responden secara umum merasakan adanya upaya perbaikan namun belum memadai.

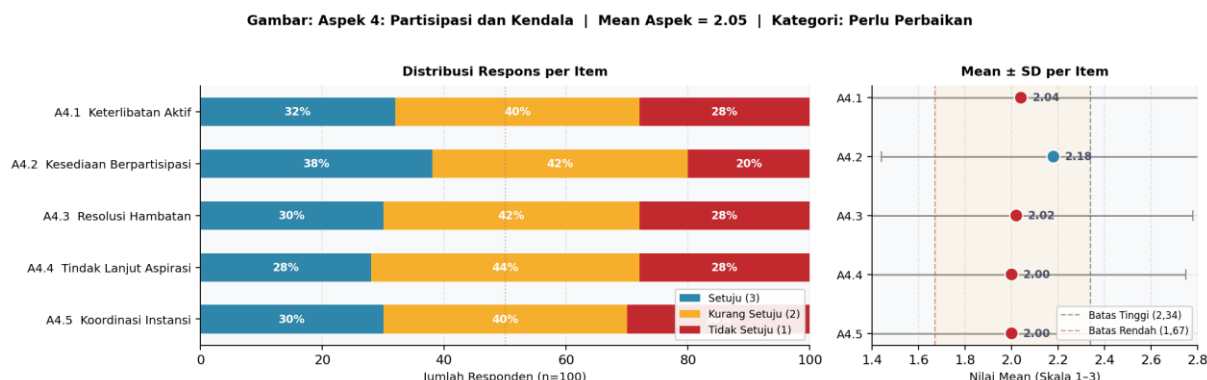
Item A3.3 (Dampak Berkelanjutan) menonjol sebagai titik kritis dengan mean terendah 2,04 ( $SD=0,77$ ;  $CV=37,9\%$ ; gap=0,96). Distribusi batang menunjukkan 68% responden memberikan respons negatif (40% KS + 28% TS), mengindikasikan bahwa manfaat jangka panjang program belum dirasakan secara signifikan. Sebaliknya, A3.2 (Manfaat Sasaran) dan A3.4 (Responsivitas Pemerintah) memperoleh mean tertinggi 2,18, dengan 38-40% responden setuju. Range aspek 0,14 merupakan terkecil kedua, menandakan persepsi yang relatif homogen.

Bapak Rustam (54 tahun) menyarankan penambahan pendamping dan fasilitas. Responden Y (29 tahun) menyarankan penggunaan aplikasi digital dan kerja sama multi-pihak.

Dua bukti empiris memperkuat argumen tentang pentingnya perbaikan sistemik. Pertama, (OECD, 2020) mendokumentasikan bahwa program sosial yang mengintegrasikan teknologi digital dalam monitoring menunjukkan peningkatan dampak berkelanjutan sebesar 35-50% dimana relevan dengan rendahnya mean A3.3 (2,04) di Lubuklinggau. Kedua, (Ansell & Torfing, 2021) membuktikan bahwa mekanisme collaborative governance menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dibanding program yang hanya mengandalkan birokrasi.

### Aspek 4: Partisipasi dan Kendala

**Gambar 4. Distribusi Respons dan Nilai Mean  $\pm$  SD – Aspek Partisipasi dan Kendala (n=100). A4.4 dan A4.5 meraih mean terendah (2,00) dengan gap terbesar (1,00).**



Gambar 4 menampilkan aspek partisipasi dan kendala sebagai aspek terlemah dengan mean 2,05 ( $SD=0,76$ ;  $CV=37,1\%$ ; gap=0,95). Koefisien variasi 37,1% merupakan tertinggi di antara keempat aspek, mencerminkan heterogenitas persepsi terbesar yang mengindikasikan pengalaman yang sangat bervariasi antar responden terkait partisipasi dan koordinasi program.

Item A4.4 (Tindak Lanjut Aspirasi) dan A4.5 (Koordinasi Instansi) sama-sama memperoleh mean terendah 2,00 (gap=1,00), yang merupakan gap terbesar dari seluruh 20 item. Distribusi batang A4.5 menunjukkan pola distribusi mendekati merata (30% S - 40% KS - 30% TS), mengindikasikan polarisasi persepsi yang signifikan. Pada A4.4, distribusi 28-44-28 menunjukkan bahwa 56% responden meragukan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Bapak Yaudi (51 tahun), anggota DPRD, mengidentifikasi masalah anggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai kendala utama. Responden N (48 tahun) menilai pemerintah cukup tanggap namun terkendala kapasitas.

Dua bukti empiris memperkuat temuan ini. Pertama, (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993) membuktikan bahwa implementasi kebijakan tanpa mekanisme feedback cenderung stagnan sesuai dengan fakta bahwa persentase AJGP tertangani hampir tidak berubah (26,3% → 27,8% dalam 7 tahun). Kedua, (Edward III, 1980) membuktikan bahwa keterbatasan finansial berpengaruh langsung terhadap kapasitas koordinasi antarinstansi, sehingga nilai rendah A4.5 (mean=2,00) bukan semata problem komunikasi melainkan defisiensi struktural anggaran operasional koordinasi.

**Tabel 6. Ringkasan Statistik Deskriptif Per Aspek Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017**

| Aspek                    | Mean        | SD          | CV (%)      | Mean Min (Item)  | Mean Maks (Item) | Range       | Gap         | Kategori               |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Komunikasi & Sosialisasi | 2,08        | 0,76        | 36,4        | 1,90 (A1.5)      | 2,22 (A1.3)      | 0,32        | 0,92        | Perlu Perbaikan        |
| Pelaksanaan Program      | 2,14        | 0,76        | 35,8        | 2,02 (A2.5)      | 2,19 (A2.3)      | 0,17        | 0,86        | Perlu Perbaikan        |
| Perbaikan Program        | 2,12        | 0,77        | 36,2        | 2,04 (A3.3)      | 2,18 (A3.2/A3.4) | 0,14        | 0,88        | Perlu Perbaikan        |
| Partisipasi & Kendala    | 2,05        | 0,76        | 37,1        | 2,00 (A4.4/A4.5) | 2,18 (A4.2)      | 0,18        | 0,95        | Perlu Perbaikan        |
| <b>Rata-rata Total</b>   | <b>2,10</b> | <b>0,76</b> | <b>36,2</b> | <b>1,90</b>      | <b>2,22</b>      | <b>0,32</b> | <b>0,90</b> | <b>Perlu Perbaikan</b> |

Sumber: Data Primer Diolah (2024). CV=Koefisien Variasi; Gap=3,00–Mean.

**Tabel 7. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) terhadap Skor Ideal 3,00**

| Aspek                    | Mean        | Gap         | % Capaian Ideal | % Kesenjangan | Interpretasi                                               |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Komunikasi & Sosialisasi | 2,08        | 0,92        | 69,3%           | 30,7%         | Sosialisasi belum merata dan kontinu                       |
| Pelaksanaan Program      | 2,14        | 0,86        | 71,3%           | 28,7%         | Gap terkecil; pelaksanaan relatif terbaik                  |
| Perbaikan Program        | 2,12        | 0,88        | 70,7%           | 29,3%         | Mekanisme perbaikan belum sistemik                         |
| Partisipasi & Kendala    | 2,05        | 0,95        | 68,3%           | 31,7%         | Gap terbesar; koordinasi lemah                             |
| <b>Rata-rata Total</b>   | <b>2,10</b> | <b>0,90</b> | <b>70,0%</b>    | <b>30,0%</b>  | <b>Implementasi parsial; perbaikan sistemik diperlukan</b> |

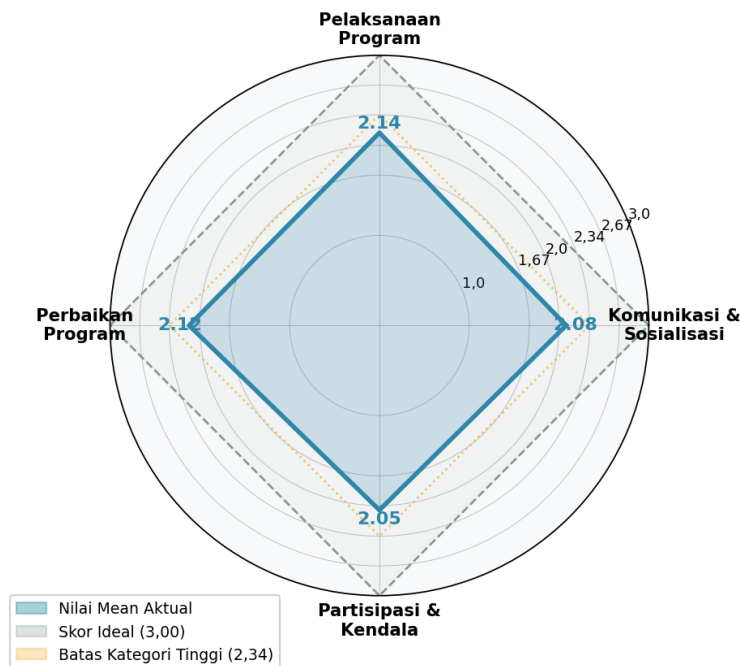
Sumber: Data Primer Diolah (2024). % Capaian=(Mean/3,00)×100%. %

Kesenjangan=((3,00–Mean)/3,00)×100%.

#### Analisis Lintas Aspek dan Temuan Utama

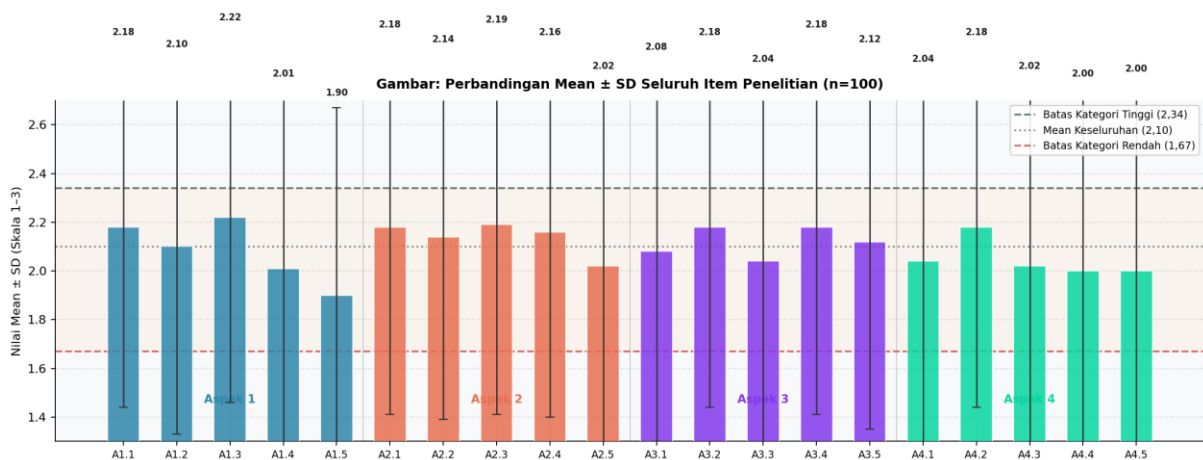
Bagian ini menyajikan empat visualisasi ilmiah yang mengintegrasikan seluruh temuan lintas aspek: (1) diagram radar profil implementasi, (2) diagram batang perbandingan mean ± SD seluruh 20 item, (3) analisis kesenjangan (gap analysis) berbasis batang, dan (4) peta panas (heatmap) distribusi nilai mean. Keempat visualisasi ini bersama-sama memberikan gambaran komprehensif tentang pola, kekuatan, dan kelemahan implementasi Perda No. 15 Tahun 2017.

**Gambar 5. Diagram Radar (Spider Chart) Profil Implementasi Empat Aspek. Area terisi biru = nilai aktual; garis putus hijau = skor ideal (3,00); garis titik kuning = batas kategori tinggi (2,34).**



Gambar 5 menyajikan profil implementasi secara radial yang memudahkan perbandingan visual antar aspek. Terlihat bahwa keempat aspek membentuk pola segi empat yang menyempit ke arah sumbu, mencerminkan kesenjangan antara 28,7-31,7% dari skor ideal pada semua aspek. Bentuk diagram yang hampir simetris (mean berkisar 2,05-2,14) mengindikasikan tidak adanya aspek yang jauh tertinggal atau unggul secara signifikan dengan permasalahan bersifat sistemik merata, bukan terkonsentrasi pada satu aspek. Aspek Pelaksanaan Program (2,14) tampak sedikit menonjol pada kuadrannya, sementara Aspek Partisipasi dan Kendala (2,05) paling mendekati batas bawah kategori sedang.

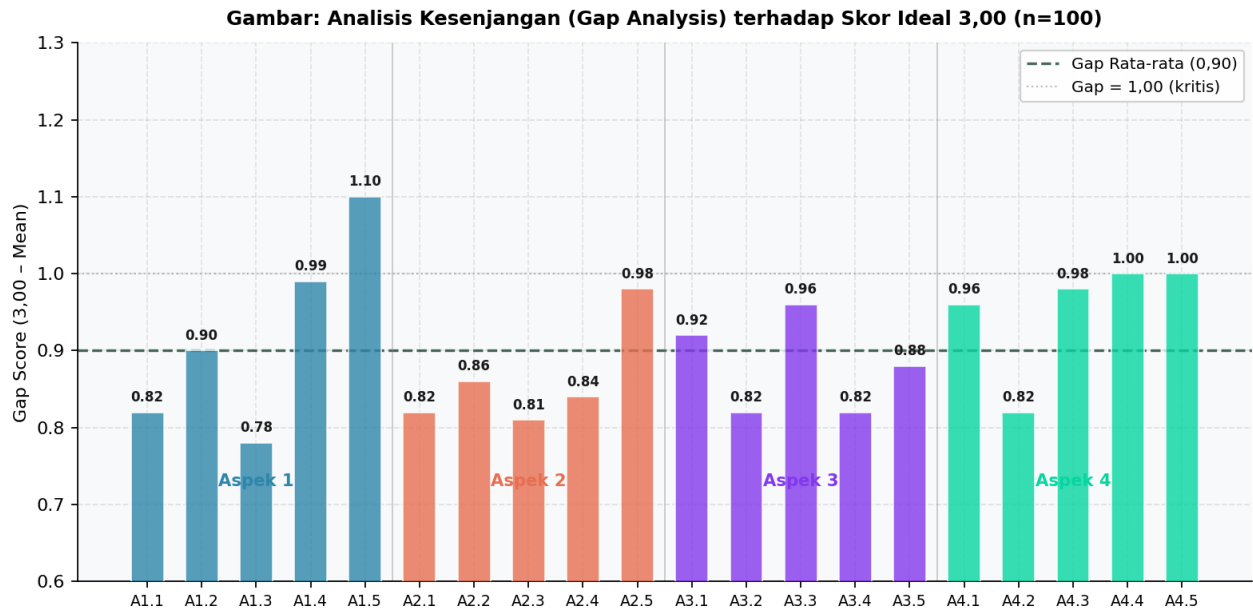
**Gambar 6. Perbandingan Mean  $\pm$  SD Seluruh 20 Item Penelitian (n=100). Batang dikelompokkan per aspek dengan kode warna. Garis putus = mean keseluruhan (2,10) dan batas kategori (2,34 dan 1,67).**



Gambar 6 memperlihatkan persebaran mean seluruh 20 item secara berurutan. Beberapa temuan penting yang terbaca secara visual: Pertama, seluruh 20 item berada dalam rentang mean 1,90-2,22, semuanya di zona Sedang (1,67-2,33) tidak ada satupun item yang mencapai kategori Tinggi ( $\geq 2,34$ ). Kedua, item

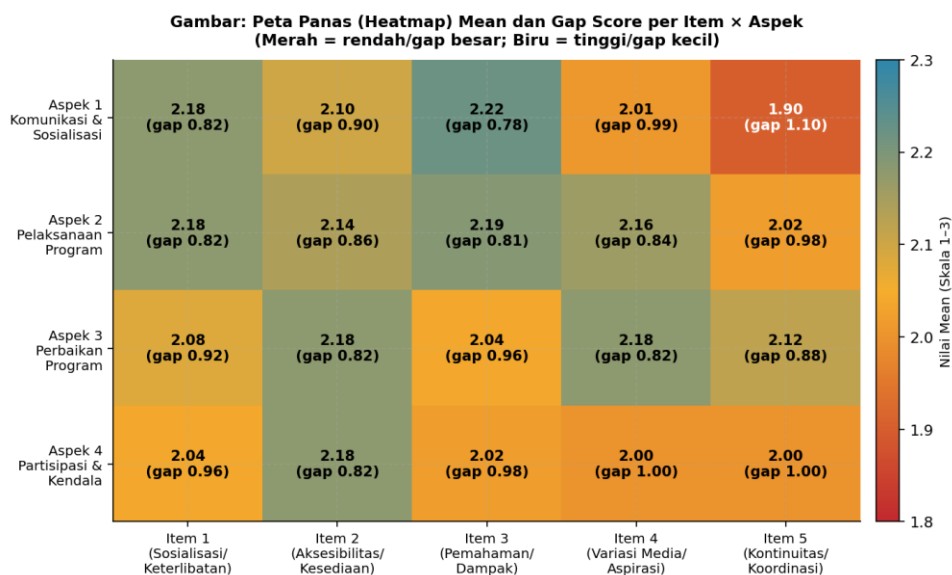
A1.5 (mean=1,90) merupakan satu-satunya item yang mendekati batas bawah kategori sedang, merupakan prioritas intervensi pertama. Ketiga, nilai SD yang konsisten (0,74-0,78) lintas item mengindikasikan homogenitas variabilitas respons, menandakan bahwa pola ketidakpuasan bersifat sistemik bukan individual. Keempat, item-item dalam Aspek 1 (biru) dan Aspek 4 (hijau toska) cenderung memiliki nilai lebih rendah dibanding Aspek 2 (oranye) dan Aspek 3 (ungu).

**Gambar 7. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) terhadap Skor Ideal 3,00 untuk Seluruh Item. Batang yang lebih tinggi = gap lebih besar = implementasi lebih lemah. Garis putus = gap rata-rata (0,90).**



Gambar 7 memvisualisasikan tingkat kesenjangan setiap item dari skor ideal. Item A1.5 (gap=1,10) dan A4.4, A4.5 (gap=1,00 masing-masing) merupakan tiga item dengan kesenjangan terbesar, berada di atas garis referensi gap rata-rata 0,90. Ketiga item ini menjadi prioritas perbaikan kebijakan tertinggi. Sebaliknya, A1.3 (gap=0,78) dan A2.3 (gap=0,81) merupakan item dengan kesenjangan terkecil, mengindikasikan kinerja implementasi yang relatif terbaik. Pola batang yang lebih tinggi secara visual pada Aspek 4 (hijau toska) mengkonfirmasi bahwa aspek Partisipasi dan Kendala merupakan aspek dengan kelemahan implementasi terbesar.

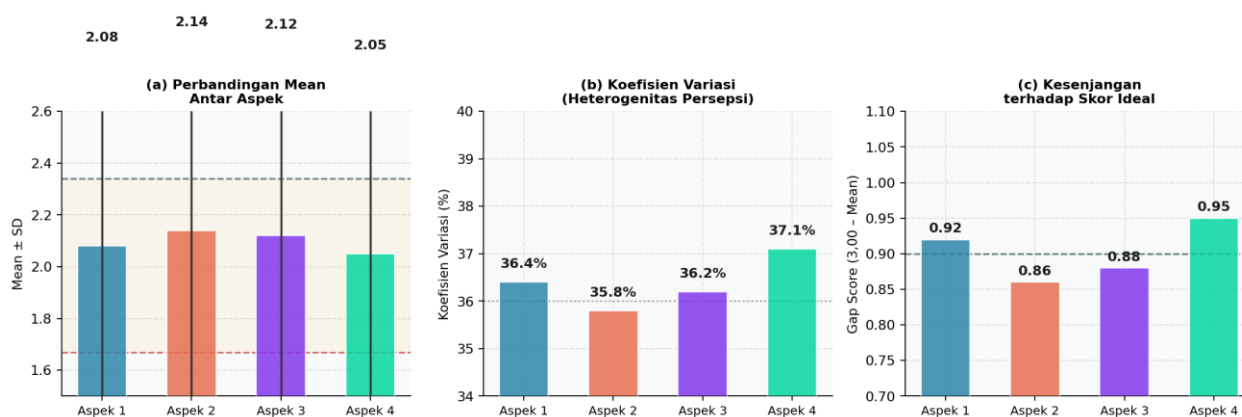
**Gambar 8. Peta Panas (Heatmap) Mean per Item × Aspek. Warna merah = mean rendah/gap besar; warna biru = mean tinggi/gap kecil. Setiap sel menampilkan nilai mean dan gap score.**



Gambar 8 menyajikan heatmap yang memberikan gambaran visual intuitif tentang distribusi kinerja implementasi. Beberapa pola penting teridentifikasi. Pola horizontal: Item ke-5 (kontinuitas/koordinasi) pada setiap aspek cenderung berwarna lebih merah (mean lebih rendah) dibanding item-item sebelumnya, mengindikasikan bahwa dimensi keberlanjutan dan koordinasi merupakan kelemahan lintas-aspek yang konsisten. Pola vertikal: Kolom Item 3 (pemahaman/dampak) menampilkan warna lebih biru pada Aspek 1 (mean  $A1.3=2,22$ ) namun lebih merah pada Aspek 3 (mean  $A3.3=2,04$ ), mengindikasikan paradoks di mana isi peraturan mudah dipahami namun dampaknya belum berkelanjutan. Sel kritis:  $A1.5$  (mean=1,90; gap=1,10) dan  $A4.5$  (mean=2,00; gap=1,00) tampak paling merah dalam matriks, memvisualisasikan secara langsung titik-titik kelemahan kritis yang memerlukan intervensi prioritas.

**Gambar 9. Analisis Komparatif Empat Aspek Implementasi: (a) Perbandingan Mean  $\pm$  SD; (b) Koefisien Variasi/Heterogenitas Persepsi; (c) Gap Score terhadap Skor Ideal. (n=100)**

Gambar: Analisis Komparatif Empat Aspek Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 (n=100)



Gambar 9 menyajikan tiga panel komparatif yang mengintegrasikan mean, koefisien variasi (CV), dan gap score. Panel (a) menunjukkan bahwa selisih mean antar aspek sangat kecil (rentang 0,09), namun perbedaan tersebut bermakna secara substantif dalam konteks kebijakan publik. Panel (b) memperlihatkan pola CV yang meningkat dari Aspek 2 (35,8%)→Aspek 3 (36,2%)→Aspek 1 (36,4%)→Aspek 4 (37,1%), mengindikasikan bahwa semakin lunak suatu aspek implementasi (bergantung pada koordinasi dan partisipasi), semakin tinggi heterogenitas persepsi masyarakat. Panel (c) mengkonfirmasi bahwa Aspek 4 (gap=0,95) merupakan aspek dengan kesenjangan terbesar, sementara Aspek 2 (gap=0,86) merupakan yang terkecil.

Secara keseluruhan, analisis lintas aspek mengungkap tiga temuan utama yang bersifat sistemik. Pertama, paradoks perseptual: data kuantitatif menunjukkan peningkatan AJGP 41,9% selama 2017-2024, namun mean implementasi tetap pada zona sedang (bukan rendah), mengindikasikan bahwa responden menilai adanya upaya implementasi meski belum menghasilkan output yang diharapkan. Kedua, pola heterogenitas yang konsisten (CV 33,9-40,4%) lintas 20 item mengisyaratkan tidak adanya konsensus yang kuat mengenai kualitas implementasi, yang harus dipertimbangkan dalam desain kebijakan partisipatif ke depan. Ketiga, capaian rata-rata 70,0% dari skor ideal dengan gap 0,90 mencerminkan implementasi parsial yang memerlukan perbaikan sistemik terintegrasi, bukan perbaikan sektoral per instansi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan AJGP secara keseluruhan berada pada kategori Perlu Perbaikan (implementasi parsial), dengan mean keseluruhan 2,10 (SD=0,76; CV=36,2%) dan capaian 70,0% dari skor ideal 3,00. Hal ini didasarkan pada empat temuan utama:

Pertama, aspek komunikasi dan sosialisasi (mean=2,08; gap=0,92) menunjukkan frekuensi dan jangkauan sosialisasi masih rendah, belum menggunakan multi-channel communication optimal, dengan

item kontinuitas sosialisasi sebagai titik kritis (mean=1,90; CV=40,4%). Kedua, aspek pelaksanaan program (mean=2,14; gap=0,86) merupakan aspek terkuat, namun program belum optimal menjangkau seluruh kelompok sasaran dan koordinasi antarinstansi masih terhambat. Ketiga, aspek perbaikan program (mean=2,12; gap=0,88) mengalami keterbatasan pendamping sosial, fasilitas, dan pemanfaatan teknologi digital, dengan dampak berkelanjutan sebagai titik kritis (mean=2,04; CV=37,9%). Keempat, aspek partisipasi dan kendala (mean=2,05; gap=0,95) merupakan aspek terlemah dengan gap terbesar, ditandai lemahnya koordinasi antarinstansi dan tindak lanjut aspirasi masyarakat (mean=2,00). Jumlah AJGP meningkat dari 160 jiwa (2017) menjadi 227 jiwa (2024) atau +41,9%.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan: (1) penguatan multi-channel communication dan intensifikasi sosialisasi secara merata; (2) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan pendamping sosial; (3) optimalisasi alokasi anggaran APBD untuk program pembinaan AJGP; (4) pembangunan sistem informasi terintegrasi antarinstansi untuk koordinasi real-time dan monitoring akuntabel; (5) pengembangan collaborative governance dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pendidikan; serta (6) penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data sebagai dasar perbaikan kebijakan iteratif khususnya untuk menekan CV tinggi pada aspek partisipasi dan kendala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation*. Cambridge University Press.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Buni, N. L., Sangadji, M., Aini, K., Aini, S. N., Aisyah, H., Parianom, R., Elsera, M., & Hamson, Z. (n.d.). *No Title*.
- Dunn, W. N. (2021). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 134–145.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2023*.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications.
- Nugroho, T., Mulyadi, M., Sakti, R., & Purnawan, H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang AJGP di Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–128.
- OECD. (2020). *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions*. OECD Publishing.
- Pertiwi, A., Nasaruddin, N., & Perdana, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan AJGP di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, 5(1), 23–40.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.
- Riduwan. (2021). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Baru). Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (Eds.). (2015). *Handbook of Practical Program Evaluation* (4th ed.). Jossey-Bass.